



**PIDATO KETUA DPR RI
PADA RAPAT PARIPURNA DPR-RI
PEMBUKAAN MASA PERSIDANGAN II
TAHUN SIDANG 2012-2013**

SENIN, 19 NOVEMBER 2012



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**PIDATO KETUA DPR RI
PADA RAPAT PARIPURNA DPR RI
PEMBUKAAN MASA PERSIDANGAN II
TAHUN SIDANG 2012-2013**

SENIN, 19 NOVEMBER 2012

Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh.
Salam Sejahtera bagi kita semua,

Yang kami hormati,

- **Para Wakil Ketua,**
- **Pimpinan Alat Kelengkapan DPR,**
- **Para Anggota DPR-RI,**
- **Hadirin yang berbahagia,**

Pada hari ini, Dewan akan membuka Masa Persidangan II Tahun Sidang 2012-2013 dan akan ditutup pada 14 Desember 2012. Dalam jangka waktu kurang dari satu bulan, Dewan tetap berusaha menjalankan tugas dan fungsinya di bidang legislasi, penetapan anggaran, pengawasan dan fungsi lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Masa Persidangan II kali ini, DPR hanya memiliki waktu selama 20 hari kerja untuk melaksanakan kegiatan tiga fungsi utamanya, yaitu fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Di dalam menjalankan fungsi legislasi, pada Masa Persidangan I, DPR bersama Pemerintah telah menyetujui 5 (lima) Rancangan Undang-Undang (RUU) Prioritas untuk disahkan menjadi Undang-Undang, dan 7 (tujuh) RUU Kumulatif Terbuka. Menjelang akhir Masa Persidangan I, ada beberapa Rancangan Undang-Undang seharusnya dapat memasuki Pembicaraan Tingkat II, seperti RUU tentang Lembaga Keuangan Mikro, RUU tentang Organisasi Kemasyarakatan, RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar, dan RUU tentang Pendidikan Kedokteran. Namun ternyata, RUU-RUU tersebut belum juga dapat dituntaskan, walaupun ada yang sudah memasuki pentahapan Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi.

Sebenarnya ada 29 (dua puluh sembilan) RUU yang sudah memasuki Pembicaraan Tingkat I. Kedua puluh sembilan RUU tersebut merupakan: 2 (dua) RUU prioritas tahun

2010, 9 (sembilan) RUU prioritas tahun 2011, dan 18 (delapan belas) RUU prioritas tahun 2012. Diharapkan di antara 29 (dua puluh sembilan) RUU tersebut dipastikan dapat memasuki Pembicaraan Tingkat II sebelum penutupan Masa Persidangan II.

Di samping itu, ada beberapa RUU Prioritas yang sedang disusun dan dipersiapkan oleh Komisi dan Badan Legislasi. RUU yang dipersiapkan oleh Komisi-Komisi, harus melalui pentahapan pengharmonisasian, pembulatan dan pematapan oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR RI. Oleh karena itu, kepada Baleg diminta memperhatikan *time table* dalam pelaksanaan kegiatannya.

Sidang Dewan yang terhormat,

Pimpinan Dewan mengamati, di antara RUU-RUU yang mendekati penyelesaian, ternyata masih menyisakan beberapa pasal yang harus dimatangkan dalam pembahasan, salah satunya adalah RUU tentang Organisasi Kemasyarakatan. Beberapa substansi yang belum menemukan kata sepakat dalam RUU ini, di antaranya adalah definisi, klasifikasi, pengaturan ormas asing, larangan, sanksi administratif, pembekuan dan pembubaran ormas, termasuk pidana bagi anggota dan pengurus Ormas yang melanggar UU. Hal ini tentu saja harus diatur secara jelas di dalam UU yang akan kita lahirkan, termasuk masalah pendanaan.

Kita juga memperhatikan adanya keberatan beberapa kalangan terhadap RUU Ormas ini. Pandangan dan keberatan, terutama berkaitan dengan kekhawatiran terhadap kebebasan berserikat dan berkumpul di Indonesia, terutama bagi organisasi yang memiliki karakter kritis terhadap Pemerintah dan lembaga legislatif. Pendapat ini pasti diperhatikan.

Untuk RUU tentang Lembaga Keuangan Mikro, telah memperoleh kemajuan dalam pembahasan. Beberapa substansi krusial mengenai Lembaga Keuangan Mikro, telah mendapatkan kesepakatan bersama di dalam rapat-rapat yang cukup efektif, yang dilakukan pada awal masa reses. *Insy Allah*, RUU ini segera dapat memasuki pengambilan keputusan pada rapat paripurna DPR awal Masa Sidang II.

Sidang Dewan yang terhormat,

Pada Rapat Paripurna 25 Oktober 2012, Dewan telah menyetujui pembentukan 5 (lima) Daerah Otonom Baru, diantara 19 (sembilan belas) RUU yang telah dipersiapkan oleh DPR-RI. Daerah-daerah otonom baru tersebut adalah: *pertama*, pembentukan Provinsi Kalimantan Utara, dan *kedua*, pembentukan 4 (empat) kabupaten baru, yaitu Kabupaten

Pangandaran di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung, serta Kabupaten Manokwari Selatan dan Kabupaten Arfak, keduanya di Provinsi Papua Barat.

Pimpinan Dewan menggarisbawahi laporan Ketua Komisi II, bahwa pembentukan daerah otonom baru merupakan solusi dalam rangka mengoptimalkan pelayanan publik, memperpendek rentang kendali pemerintahan untuk lebih efisien dan efektif. Hal ini sejalan dengan azas umum dan tata kelola pemerintahan yang baik, demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat dan memperkokoh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pimpinan Dewan mendukung Ketua Komisi II yang dalam laporannya mengatakan, bahwa pemekaran bukanlah sekedar menggerogoti keuangan negara, tetapi lebih dari itu, dengan pemekaran, sekaligus menjaga kedaulatan dan martabat bangsa.

Alasan keamanan nasional dalam pembentukan Provinsi Kalimantan Utara sangatlah tepat, karena merupakan *open gate* ke wilayah Sabah Malaysia, Filipina Selatan, dan Brunei Darussalam. Kalimantan Utara berada pada posisi strategis yang perlu dikembangkan menjadi kekuatan nasional, dalam menghadapi gangguan atau ancaman yang membahayakan integritas dan identitas kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Demikian pula pembentukan 4 (empat) daerah otonom baru. Daerah-daerah ini, terutama pegunungan Arfak dan Manokwari Selatan, sangat memprihatinkan. Rakyat di daerah ini wajib dilindungi, disejahterakan dan dicerdaskan. UU pembentukan daerah otonom baru ini, sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua Komisi II adalah UU yang mengakomodasi manusia baru, nama baru, kehidupan baru, wilayah baru dengan identitas baru, yang memiliki hak yang penuh dan diharapkan sama dengan daerah-daerah lain.

Terkait dengan RUU tentang Keamanan Nasional (Kamnas), saat ini Pansus sedang mendalami draf RUU yang telah mendapatkan penjelasan dari Pemerintah terkait poin-poin krusial yang ada. RUU Kamnas ini diharapkan dapat menjadi UU yang tetap mengedepankan supremasi sipil, mengakomodasi semangat reformasi dan menegakkan nilai-nilai demokrasi, hukum dan HAM, yang selama ini kita perjuangkan bersama, serta tidak tumpang tindih dengan UU yang sudah ada.

Sidang Dewan yang terhormat,

Berdasarkan Pasal 20 ayat (1) UUD Negara RI tahun 1945 yang mengatur bahwa "*DPR memegang kekuasaan membentuk Undang Undang,*" pembentukan UU menjadi tanggung

jawab bersama dengan Pemerintah, karena dalam Pasal 5 ayat (1) disebutkan "*Presiden berhak mengajukan RUU kepada DPR.*" Oleh sebab itu, keberhasilan pelaksanaan fungsi legislasi juga menjadi tanggung jawab bersama antara DPR dan Pemerintah. Pemerintah juga dituntut untuk berperan serta melaksanakan Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Dalam Rapat Paripurna ini, Pimpinan Dewan mengingatkan Pemerintah agar bersungguh-sungguh menjalankan Prolegnas dalam menyusun RUU yang telah menjadi prioritas, yang menjadi porsi Pemerintah untuk mempersiapkannya.

Kami juga mengamati bahwa, dalam pembangunan hukum nasional, RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sangat *urgent* untuk dipersiapkan. Seperti kita ketahui UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, merupakan UU peninggalan zaman Hindia Belanda yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, dan saat ini KUHP sejenis di negara Belanda sudah dicabut dan diganti dengan KUHP baru. Bagi Indonesia sendiri, pentingnya pembentukan KUHP selain untuk membentuk sistem hukum pidana versi Indonesia juga dimaksudkan untuk menyesuaikan kondisi dan zaman saat ini yang berbeda dengan zaman di era tahun 1940-an. Oleh sebab itu wajar, kalau RUU tentang KUHP merupakan salah satu prioritas RUU yang harus diselesaikan oleh DPR periode 2009–2014.

Seiring dengan pentingnya keberadaan RUU KUHP tersebut, maka RUU tentang KUHP harus diikuti juga dengan RUU tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). RUU tentang KUHAP dirasakan penting karena saat ini UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, dimana tingkat pelanggaran pidana sudah semakin canggih.

Dalam kaitan dengan fungsi legislasi ini, sekali lagi, Pimpinan mengingatkan bahwa pelaksanaan fungsi ini harus benar-benar dioptimalkan, mengingat keterbatasan waktu masa-masa sidang DPR pada periode saat ini. Masa Sidang sekarang hanya 20 (dua puluh) hari kerja, sedangkan masa sidang yang akan datang juga relatif pendek, sementara tahun 2013 dipastikan pelaksanaan fungsi ini tidak akan dapat berjalan optimal mengingat akan digelarnya Pemilu 2014.

Dalam kaitan inilah, Pimpinan DPR mengingatkan kepada para Anggota terhadap sumpah/janji sebelum memangku jabatan. Pimpinan DPR berharap sumpah/janji tersebut dapat kita laksanakan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab di sisa masa jabatan kita, yang akan berakhir pada tahun 2014.

Kepada Pimpinan Fraksi diharapkan peran sertanya untuk memberikan dukungan penuh bagi kelancaran pelaksanaan fungsi legislasi, sebagaimana diatur oleh Tata Tertib

DPR. Pimpinan Fraksi bertugas untuk mengoordinasikan semua kegiatan, meningkatkan kemampuan, disiplin, efektifitas dan efisiensi kerja anggotanya dalam melaksanakan tugas.

Sidang Dewan yang terhormat,

Dalam pelaksanaan fungsi anggaran, Dewan akan fokus kepada evaluasi pelaksanaan APBN 2012 dan nantinya akan mengamati serta mengawasi berbagai hal dalam kaitannya dengan pembangunan ekonomi, atas dasar APBN 2013 yang telah kita setuju bersama.

Dewan dan Pemerintah telah menetapkan target penerimaan perpajakan pada APBN 2013 sebesar Rp. 1.193,6 triliun dengan *tax ratio* sekitar 12,87% terhadap PDB. Jumlah ini setara 79,1% dari total pendapatan negara di APBN 2013. Berdasarkan data tersebut, porsi penerimaan perpajakan di APBN 2013 ini lebih besar ketimbang APBN-P 2012. Dewan meminta kepada Pemerintah, agar benar-benar melakukan langkah konkret dalam mengamankan dan mengoptimalkan sasaran penerimaan perpajakan tahun 2013 dengan berbagai langkah yang telah diuraikan pada Pembahasan Tingkat I. Direktorat Jenderal Pajak harus bekerja lebih keras dalam mencapai realisasi penerimaan tersebut. Hal ini perlu, karena salah satu kelemahan dari penerimaan perpajakan adalah tingginya tunggakan pajak dari para wajib pajak.

Peringatan ini perlu kita sampaikan untuk mencegah tunggakan pajak yang semakin tinggi. Pemerintah seharusnya menggunakan instrumen hukum dalam UU No. 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Dalam UU tersebut, sudah diatur upaya hukum yang diberikan kepada petugas pajak untuk melakukan, *pertama* penagihan seketika dan sekaligus, *kedua*, memberitahukan surat paksa, *ketiga*, mengusulkan pencegahan, *keempat*, melakukan penyitaan, *kelima*, melaksanakan penyanderaan dan, *keenam*, menjual barang yang telah disita.

Melalui enam instrumen hukum inilah, diharapkan para penunggak pajak dapat membayar kewajiban perpajakannya kepada negara. Tidak perlu ada ketakutan bagi petugas pajak untuk menagih tunggakan pajak melalui instrumen hukum dalam UU No. 19 Tahun 1997, karena UU tersebut telah memberikan kepastian hukum bagi petugas pajak untuk menagih pajak kepada para penunggak pajak.

Namun di sisi lain, kita harus menyadari bahwa setiap penerimaan sektor pajak harus digunakan benar-benar bagi pembangunan dan kebutuhan masyarakat luas. Semua pihak yang menggunakan anggaran negara yang berasal dari pungutan pajak, harus dapat mempertanggungjawabkan dan menggunakan anggaran tersebut sesuai prioritas bagi

kepentingan publik, antara lain pembangunan infrastruktur dan pembiayaan berbagai subsidi dengan arah yang tepat sasaran. Dewan menghimbau agar semua pihak menjaga situasi ekonomi tetap kondusif, agar permasalahan tuntutan penyesuaian upah dan gejolak buruh yang mengganggu kegiatan industri dan investasi, dapat diminimalkan. Dewan juga meminta semua pihak perlu mengedepankan kepentingan bersama, oleh karena itu, permasalahan ini perlu dicarikan penyelesaian tanpa ada pihak yang merasa dirugikan.

Sidang Dewan yang terhormat,

Kebijakan pembatasan konsumsi BBM masih terus menjadi perhatian Dewan, setelah Dewan menyetujui kuota konsumsi BBM untuk tahun 2013 sebesar 46,1 juta kiloliter. Jumlah kuota konsumsi BBM tersebut meningkat dibandingkan tahun 2012 lalu. Dalam kaitan ini, Dewan mendukung langkah apapun yang direncanakan Pemerintah seperti adanya pembatasan pembelian BBM bersubsidi yang seharusnya lebih tepat sasaran. Ketepatan-sasaran kebijakan Pemerintah akan sulit dijalankan bila masih ada kelompok masyarakat yang seharusnya sama sekali tidak memanfaatkan subsidi, tetapi tetap membeli BBM bersubsidi.

Pembatasan penggunaan BBM bersubsidi bagi pemilik mobil pribadi, harus ketat dilakukan dalam upaya menekan kuota BBM bersubsidi, agar tetap di angka 46,1 juta kiloliter di tahun depan. Untuk itu Dewan meminta, Pemerintah konsisten dengan kebijakannya, mengawasi pelaksanaannya yang dipastikan akan sulit. Dewan juga meminta pemerintah mempersiapkan berbagai hal terkait pemberlakuan kebijakan agar tidak menimbulkan keresahan dan kebingungan di masyarakat. Di samping itu, Pemerintah juga harus selektif mengeluarkan kebijakan impor mobil yang hemat energi, sehingga tidak mengganggu kebijakan pembatasan BBM bersubsidi.

Sidang Dewan yang terhormat,

Mahkamah Konstitusi pada 13 November 2012, menyatakan bahwa BP Migas bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Dampak hukum atas Putusan MK adalah bahwa eksistensi BP Migas tidak dapat melakukan tindakan hukum terhadap kegiatannya.

Pemerintah dan DPR perlu melakukan langkah-langkah penting. Pemerintah perlu mengambil tindakan cepat untuk memulihkan kegiatan kontraktor migas yang diselenggarakan sesuai dengan kontrak yang telah ditandatangani antara BP Migas dan kontraktor Migas. Karyawan BP Migas tidak perlu resah dengan Putusan MK ini, karena

Kementerian ESDM akan menentukan tindak lanjut atas putusan ini, termasuk kepentingan para karyawan BP Migas. Putusan MK jangan sampai menimbulkan gejolak ekonomi dan menimbulkan kekhawatiran di kalangan investor, terutama investor asing.

Kita mengapresiasi Presiden yang hari itu juga memberikan penjelasan kepada publik, mengenai kebijakan yang segera diambil terkait dengan Putusan MK.

DPR perlu segera menyelesaikan pembentukan RUU tentang Minyak dan Gas (Migas), mengingat RUU Migas termasuk salah satu RUU Prioritas tahun 2010–2014. Dalam pembentukan RUU Migas perlu dipikirkan lembaga yang akan mengurus kegiatan Migas ini. Tindakan yang perlu diperhatikan juga, adalah perlunya audit terhadap keuangan BP Migas, dan terhadap aset-aset agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu.

Sidang Dewan yang terhormat,

Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, Dewan mendukung pernyataan Presiden yang meminta seluruh jajaran Pemerintah, baik pusat maupun daerah, agar menghindari penyalahgunaan atau penyimpangan anggaran negara. Dewan meminta kepada BPK, BPKP, dan lembaga-lembaga pengawas lainnya, untuk lebih intensif memonitor, mengawasi pengelolaan dan penggunaan anggaran negara. Perencanaan anggaran negara telah ditempuh dengan benar. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya pun harus tepat sasaran, dan tetap mengacu kepada UU. Dewan juga meminta Pemerintah untuk mempercepat pengucuran anggaran, apabila semua sistem, mekanisme, dan prosedur anggaran sudah ditempuh dengan benar, sehingga penyerapan anggaran dapat segera dimulai pada awal pelaksanaan anggaran.

Menyikapi adanya dugaan penyimpangan penggunaan anggaran negara untuk proyek Pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang, Bogor, Dewan akan mempelajari Hasil Pemeriksaan Investigatif tahap I yang telah diserahkan kepada Dewan oleh BPK pada 31 Oktober yang lalu.

Perlu diingat bahwa laporan pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang diserahkan merupakan salah satu dari tiga jenis pemeriksaan atas keuangan negara yang dilaksanakan oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Pemeriksaan dengan tujuan tertentu menghasilkan kesimpulan sesuai dengan tujuan khusus dari pemeriksaan itu sendiri.

Adanya pengungkapan penyimpangan dalam pemeriksaan investigatif ini, DPR harus menindaklanjutinya, khususnya oleh Panja Hambalang Komisi X dan BAKN DPR-RI.

BAKN DPR-RI selama masa reses, telah melakukan kajian dan evaluasi atas hasil pemeriksaan BPK, dan mengambil keputusan dalam bentuk rekomendasi yang telah disampaikan kepada Pimpinan DPR. Ada 6 (enam) rekomendasi yang dihasilkan, di antaranya adalah *pertama*, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) diminta menelusuri aliran dana P3SON, karena ada indikasi kerugian negara hingga Rp. 243,6 milyar. *Kedua*, direkomendasikan juga agar KPK menuntaskan penyidikan dan penuntutan terhadap kasus Hambalang dengan adanya bukti penyimpangan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pengelola proyek. *Ketiga*, BAKN meminta Pimpinan Komisi X dan Kelompok Kerja Anggaran DPR bertanggung jawab atas proses pembahasan dan persetujuan proyek Hambalang dalam rapat-rapat di DPR.

Apabila dari pengungkapan penyimpangan tersebut mengarah kepada suatu dugaan penyimpangan peraturan perundang-undangan, penyalahgunaan kewenangan, tindak pidana umum atau dugaan tindak pidana korupsi, kiranya penyimpangan tersebut dapat ditindaklanjuti oleh para penegak hukum.

Sidang Dewan yang terhormat,

Pemerintah dan Dewan telah sepakat akan menaikkan Tarif Dasar Listrik (TDL) sebesar 15% di tahun depan. Imbal baliknya, Pemerintah menjanjikan akan menyediakan infrastruktur yang lebih baik. Kenaikan tarif dasar listrik ini akan memberi tambahan Rp. 11,8 triliun bagi sektor infrastruktur tahun depan. Rencana kenaikan tarif dasar listrik ini akan diserahkan kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk mengatur pelaksanaannya, apakah akan naik per bulan atau per tiga bulan. Sebagaimana diketahui, anggaran infrastruktur untuk Tahun Anggaran 2013 mendatang ditetapkan sebesar Rp. 213 triliun. Angka tersebut merupakan angka anggaran infrastruktur tertinggi sejak reformasi.

Permasalahan inefisiensi penggunaan BBM untuk pembangkit listrik oleh PT. PLN sebesar Rp. 37,6 triliun sebagaimana audit BPK, menjadi perhatian Dewan. Dalam masa reses, Komisi VII DPR-RI telah melakukan Rapat Kerja dengan Menteri ESDM dan Rapat Dengar Pendapat dengan BP. Migas, BPH Migas, PT. PLN (Persero), PT. Pertamina (Persero), PT. PGN (Persero), serta Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Saudara Dahlan Iskan selaku mantan Dirut PT. PLN, dengan agenda pokok fungsi pengawasan DPR-RI, khususnya terkait dengan tindak lanjut temuan laporan hasil pemeriksaan BPK-RI terhadap PT. PLN, BP. Migas, dan Kementerian ESDM.

Dalam rapat ini, belum mendapatkan hasil optimal sesuai dengan agenda pokok pembahasan, sehingga rapat ditunda, dan direncanakan diselenggarakan kembali pada Masa Sidang II.

Dewan tidak ingin berpolemik terhadap masalah ini. Oleh karenanya, perlu segera mendapatkan kejelasan. Dewan meminta, manajemen PT. PLN untuk tetap fokus meningkatkan efisiensi, khususnya efisiensi pemakaian sumber energi untuk pembangkit. Dewan menilai, rencana pembangunan energi listrik 10.000 MW adalah hal yang sangat *urgent* dan harus segera diselesaikan.

Sidang Dewan yang terhormat,

Dalam satu bulan terakhir ini, berbagai permasalahan di tengah masyarakat Indonesia, cukup menyita perhatian kita. Hasil verifikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang partai politik peserta Pemilu yang lolos dan tidak lolos, masih belum sepenuhnya tuntas. KPU mengumumkan, dari 34 (tiga puluh empat) parpol, 16 (enam belas) dinyatakan lolos administrasi, dan 9 (sembilan) di antaranya adalah parpol yang telah duduk di DPR.

Sekarang ini, kita masih menunggu proses verifikasi faktual yang dilakukan oleh KPU. Diharapkan, KPU dapat bekerja dengan cermat, profesional, agar pentahapan Pemilu dapat dilaksanakan sesuai dengan agenda.

Sidang Dewan yang terhormat,

Baru-baru ini, kita untuk kesekian kalinya, dikejutkan dan merasakan keprihatinan mendalam atas terjadinya konflik di Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan. Konflik ini mengakibatkan 14 (empat belas) orang meninggal dunia, ratusan rumah dibakar, dan 2.000 (dua ribu) orang terpaksa mengungsi. Berbagai konflik yang terjadi belakangan ini, menunjukkan bahwa, keberagaman yang selama ini kita banggakan dan agungkan, telah berkembang menjadi konflik berdarah antar warga yang membawa korban jiwa dan harta benda.

Konflik horizontal ini telah mengancam sendi-sendi persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam beberapa kasus konflik antar-warga yang pernah terjadi di Ambon, Sampit, Sampang, dan tempat-tempat lain, tergambar bahwa kerukunan antar-warga terutama kerukunan antara penduduk pendatang dan penduduk asli, harus benar-benar ditangani dengan baik, agar tidak memunculkan disintegrasi.

Peta potensi konflik di tanah air sudah seharusnya diketahui oleh Pemerintah. Oleh karena itu, Dewan mendukung upaya pencegahan konflik di daerah-daerah berpotensi konflik, sedini mungkin. Semua pihak diundang melakukan pendekatan, terutama pendekatan budaya, untuk meminimalkan friksi-friksi antar-etnik serta menciptakan kerukunan dan ketenteraman bersama. Pendekatan akan memacu semangat persaudaraan di tengah-tengah masyarakat. Pembauran dengan masyarakat setempat akan mendorong setiap warga untuk dapat memainkan peran dengan baik, sehingga terwujud perdamaian yang abadi di seluruh kawasan Indonesia. Dewan berpendapat, untuk mencegah konflik semacam ini terjadi di daerah lain, maka Pemerintah perlu membuat peta daerah rawan konflik.

Selain potensi konflik horizontal, permasalahan terorisme di Indonesia masih menjadi tantangan keamanan. Hal ini menegaskan komitmen kuat dari aparat keamanan, khususnya Polri dibantu TNI, untuk dapat meningkatkan kinerja dan profesionalitasnya agar ketenteraman di masyarakat Indonesia dapat terwujud.

Terorisme muncul kembali, selain dalam berbagai bentuk, juga dengan wajah-wajah baru yang merupakan perekrutan terhadap anak-anak muda. Dewan mengingatkan sekali lagi, bahwa kesuksesan memberantas terorisme tersebut akan semakin cepat, bila seluruh rakyat Indonesia bersatu-padu bekerja sama dengan aparat keamanan, terutama dalam hal memberikan informasi mengenai hal-hal terkait potensi terorisme di lingkungannya masing-masing.

Sidang Dewan yang terhormat,

Di bidang sosial, di tengah upaya keras untuk menjaga keamanan dan ketenteraman, Pemerintah Indonesia dan Malaysia diserang iklan yang melecehkan para TKI dan martabat bangsa. Dewan meminta Pemerintah terus memantau penanganan hukum secara tuntas atas kasus-kasus TKI di Malaysia, dan juga terus melaksanakan strategi diplomasi efektif untuk mengembalikan martabat bangsa.

Perlu diingatkan kembali bahwa Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia telah menyepakati nota kesepahaman mengenai rekrutmen dan penempatan tenaga kerja di Malaysia yang ditandatangani pada tahun 2006. Amandemen terhadap nota kesepahaman pada Mei 2011 dilakukan untuk mendapatkan kesepakatan terkait hak-hak TKI, termasuk masalah gaji, kontrak kerja dan hari libur. Tidak dapat dipungkiri tentang perlu adanya pembenahan manajemen penempatan TKI terutama di Malaysia, mengingat hampir 70% pekerja migran di Malaysia berasal dari Indonesia.

Sidang Dewan yang terhormat,

Perlindungan terhadap masyarakat Indonesia yang berada di luar negeri, tidak hanya dilakukan terhadap mereka yang sedang bekerja, tetapi juga terhadap warga Indonesia yang sedang menjalankan ibadah haji. Proses ibadah haji 2012 telah berakhir, dan sebagian jemaah haji Indonesia sudah dan sedang menunggu kepulangan sesuai kelompok terbang yang telah ditetapkan. Seperti penyelenggaraan haji tahun lalu, maka tahun ini DPR kembali membentuk dua tim, yang terdiri dari Tim Pengawas Tahap I dan Tim Pengawas Tahap II.

Beberapa permasalahan yang ditemukan oleh kedua tim masih berkisar kepada hal-hal yang berkaitan dengan pemondokan, sarana dan prasarana, transportasi, makan bagi jemaah, pelayanan kesehatan, dan perlindungan dari tindak kejahatan. Permasalahan yang merata hampir di semua jenis pelayanan, memunculkan kesan belum ada peningkatan secara maksimal dalam kualitas pelayanan kepada para jemaah, baik dari sisi Pemerintah Indonesia maupun dari Pemerintah Arab Saudi. Selain itu, Dewan sangat menyesalkan, lagi-lagi ada kasus calon jemaah yang batal berangkat yang disebabkan penanganan biro perjalanan yang tidak profesional. Pemerintah perlu menertibkan biro perjalanan haji yang telah melakukan penipuan dan melakukan tindakan hukum terhadap badan-badan ini.

Dengan jumlah jemaah haji Indonesia yang besar, sudah saatnya, Pemerintah melakukan evaluasi dan penyempurnaan secara komprehensif terhadap sistem pelayanan haji Indonesia agar lebih efisien dan nyaman. Oleh karena itu, rencana revisi UU Haji yang telah diprioritaskan dalam Prolegnas, untuk segera dibahas. Komitmen Dewan dalam revisi UU Haji adalah fokus pada terselenggaranya pelayanan haji yang profesional, baik dan amanah. Oleh karena itu, masih perlu dipertimbangkan adanya pemisahan antara regulator dan operator.

Sidang Dewan yang terhormat,

Permasalahan dalam pengelolaan dan kepatuhan pelaporan Barang Milik Negara (BMN) menjadi hal penting dalam upaya menjaga aset kekayaan negara. Kepatuhan pelaporan adalah upaya-upaya dan perjuangan yang harus terus menerus dilakukan dengan pendekatan profesionalitas.

Baru-baru ini, perangkat pendukung kedewanan yaitu Sekretariat Jenderal, telah menerima penghargaan BMN Awards sebagai bentuk dari penataan Barang Milik Negara

yang berhasil dilakukan sejak tahun 2006. Sekretariat Jenderal DPR RI menjadi juara kedua untuk kategori kepatuhan pelaporan. BMN Awards dari Kementerian Keuangan, merupakan buah dari keseriusan mengikuti aturan perundang-undangan.

Pimpinan Dewan mengapresiasi penghargaan ini dan mengharapkan, bahwa apa yang telah dicapai dapat memberikan motivasi kepada seluruh jajaran Kesetjenan DPR agar dapat lebih optimal dalam mengelola barang milik negara. Hal ini bisa tercapai karena peran Badan Urusan Rumah Tangga DPR-RI sebagai lembaga supervisi dalam pelaksanaan pengelolaan aset negara.

Perlu ditekankan, bahwa belum saatnya lembaga DPR, khususnya lembaga pendukung, berpuas diri terhadap apa yang dicapai, karena masih banyak beban kerja yang belum tuntas. Pimpinan Dewan berharap, rangkaian catatan positif DPR ini dapat diteruskan, seperti raihan Laporan Keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah tiga kali berturut-turut diterima dari BPK.

Sidang Dewan yang terhormat,

Di samping berbagai kegiatan dan berbagai hal yang kita kemukakan tersebut, perlu diinformasikan bahwa pada masa sidang ini, DPR akan memproses calon-calon pejabat publik. Penetapan pejabat-pejabat publik yang akan dilaksanakan pada Masa Persidangan II adalah pemrosesan calon Anggota KPPU 2012-2016, pencalonan Hakim Agung, pencalonan Deputi Gubernur Bank Indonesia, dan pemberian pertimbangan jabatan keanggotaan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN). Kegiatan ini hanya dapat dilakukan pada Masa Sidang dan ada kalanya terkendala dengan berakhirnya masa jabatan pejabat-pejabat publik yang bersangkutan, sementara itu daftar calon yang disampaikan kepada DPR juga sering terlambat. Ke depan, hal ini perlu lebih ditertibkan.

Sidang Dewan yang terhormat,

Sebagai bagian dari masyarakat internasional, kita perlu memperkuat kerja sama dengan negara-negara sahabat, baik secara bilateral maupun multilateral. Dalam kaitan ini, Dewan mengapresiasi kunjungan kenegaraan Presiden Republik Indonesia, Dr. Susilo Bambang Yudhoyono disertai Ketua DPR, Ketua DPD, Ketua Komisi II dan beberapa anggota Kabinet Indonesia Bersatu II, ke Inggris, dalam rangka memenuhi undangan Ratu Elizabeth II. Dewan mengucapkan selamat kepada Presiden RI yang menerima penghargaan "*Knight Grand Cross in the Order of the Bath*", dan Ketua DPR yang

menerima penghargaan "*Knight Commander in Order of St. Michael and St. George*" dari Ratu Inggris. Kita berharap kerjasama Indonesia-Inggris kedepan, akan semakin meningkat, terutama di bidang investasi dan perdagangan, dan membawa kemajuan bagi kedua bangsa.

Dalam kerangka multilateral, kehadiran Indonesia dalam Konferensi Tingkat Tinggi *Asian-Europe* (ASEM) ke-9 di Vientiane Laos, pada 5-6 November 2012, kita anggap memiliki arti penting. Dewan berharap, kesepakatan-kesepakatan yang dicapai dalam KTT ASEM tersebut dapat lebih implementatif, sehingga menghasilkan manfaat yang konkret bagi semua pihak yang terlibat, terutama bermanfaat bagi kepentingan nasional Indonesia.

Kita menyambut baik diselenggarakannya Forum Demokrasi Bali (BDF) selama dua hari, yang berlangsung 8-9 November 2012, di Bali. Dewan berpandangan, forum yang dihadiri oleh sejumlah kepala negara dan kepala pemerintahan, merupakan forum penting bagi kemajuan bersama dalam upaya negara-negara dan pemerintahan di dunia dalam menjunjung tinggi demokrasi, yang lebih berkeadilan dan menghargai hak-hak asasi manusia. Dewan mengapresiasi pandangan Presiden RI yang disampaikan dalam forum tersebut, bahwa selain perlunya membangun demokrasi yang lebih baik, juga perlu diupayakan reformasi keanggotaan tetap di Dewan Keamanan PBB sebagai bagian dari demokratisasi badan dunia tersebut. Reformasi diperlukan untuk memastikan adanya harmoni antara anggota Dewan Keamanan PBB dan sebagian besar anggota PBB lainnya.

Sehubungan dengan rencana pelaksanaan *the Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) ke-18 di Doha Qatar, pada 26 November sampai 7 Desember 2012, Dewan meminta Pemerintah untuk memaksimalkan kemampuan diplomasinya dan memimpin negara-negara yang rentan terhadap dampak perubahan iklim, untuk bersama-sama memberikan tekanan kepada negara-negara industri untuk segera menurunkan tingkat emisi gas rumah kaca mereka, serta mengupayakan realisasi kesepakatan-kesepakatan yang telah dicapai melalui pertemuan-pertemuan sebelumnya. Bumi membutuhkan tindakan penyelamatan segera, sebelum masa depan umat manusia menjadi semakin suram akibat peningkatan suhu global.

Perlu kami sampaikan juga, bahwa Delegasi DPR-RI pada 15-16 November 2012 telah menghadiri Sidang Tahunan Konferensi Parlemen tentang WTO di Jenewa Swiss, guna berdiskusi dan berbagi pengetahuan dengan sesama anggota parlemen negara-negara lain, tentang bagaimana menata sistem perdagangan internasional yang lebih baik dan adil bagi masyarakat internasional.

DPR-RI yang diwakili oleh Wakil Ketua DPR/Korinbang, telah menghadiri dan berpartisipasi dalam *International Anti-Corruption Conference* ke-15 pada tanggal 7-10 November 2012 di Brazilia bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Mahkamah Agung. Dalam konferensi tersebut, DPR bersama Mahkamah Agung telah menegaskan komitmennya untuk memberikan dukungan terhadap tugas dan fungsi KPK dalam memerangi impunitas terkait dengan upaya pemberantasan korupsi, dan melakukan langkah-langkah dalam mewujudkan pemerintahan yang adil dan transparan. Selain itu, Wakil Ketua DPR/Korekku telah memimpin delegasi muhibah ke Kyrgyztan dan Ekuador dalam rangka meningkatkan hubungan kerjasama antar kedua negara, khususnya antar kedua parlemen.

Perlu juga kami sampaikan bahwa, dari tanggal 21-24 November 2012, DPR RI akan menjadi tuan rumah pelaksanaan *Parliamentary Event on Interfaith Dialogue*, sebagai bagian dari kegiatan organisasi antar-parlemen negara-negara anggota OKI atau PUIC. *Parliamentary event* yang akan dilaksanakan di Nusa Dua Bali ini, mengambil tema "Peran Parlemen dalam Mengembangkan Kerjasama Antar-Keyakinan dan Antar-Budaya" atau *the Parliamentary Role in Promoting Interfaith and Intercultural Cooperation*. Tujuan dari diselenggarakannya *parliamentary event* ini, adalah untuk mengembangkan kerja sama antarkeyakinan dan antarbudaya di kalangan parlemen negara-negara anggota PUIC, dan mencari solusi atas berbagai persoalan yang berkaitan dengan pengembangan kerja sama antar-keyakinan dan antar-budaya.

Berpijak pada pentingnya pemahaman mengenai mandat internasional *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) dalam perang global melawan korupsi, dan upaya untuk mewujudkan eksistensi nasional dalam kancah perang anti-korupsi di tingkat internasional, DPR RI bekerjasama dengan *Global Organization of Parliamentarians Against Corruption* (GOPAC) akan menggelar Workshop sehari pada bulan Desember 2012 dengan tema "*Engaging Parliamentarians in the United Nations Convention against Corruption*". Tujuan diselenggarakannya Workshop ini yaitu untuk: menginisiasi pembentukan *National Chapter Parliamentarians against Corruption* sebagai bagian dari komitmen internasional parlemen untuk melawan korupsi; membuka ruang dialog dan pendalaman UNCAC bagi para anggota DPR RI; dan menjadi sarana pengayaan penguatan integritas dan etika bagi penyelenggara negara terutama anggota parlemen.

Sidang Dewan yang terhormat,

Situasi yang makin tidak terkendali berkaitan dengan serangan Israel ke Jalur Gaza beberapa hari terakhir, mengundang reaksi keras masyarakat Internasional. Indonesia yang sejak awal mendukung penuh berdirinya Palestina mengecam keras serangan tentara Israel ke Palestina yang hingga saat ini telah menelan korban puluhan tewas, ratusan terluka, dan hancurnya bangunan-bangunan penting.

Dewan mengharapkan operasi militer 'Pilar Pertahanan' Israel yang telah dimulai sejak Rabu kemarin dapat segera dihentikan. Semoga kedua belah pihak dapat sama-sama menahan diri dan tergerak untuk melakukan gencatan senjata. Kita semua tidak menginginkan peristiwa serangan terbuka empat tahun yang lalu (2008), di tempat yang sama, dengan korban lebih dari 1.400 orang -termasuk masyarakat sipil-, terulang kembali.

Sidang Dewan yang terhormat,

Dalam kaitan dengan kerjasama internasional di antara bangsa-bangsa, masyarakat internasional menyambut baik terpilihnya Barack Obama sebagai Presiden Amerika Serikat untuk periode kedua pada Pemilu Presiden 6 November yang lalu. Kita berharap, terpilihnya kembali Obama sebagai Presiden Amerika Serikat, tidak saja akan membawa kebaikan bagi masyarakat Amerika, tetapi juga membawa kemajuan yang lebih berarti bagi masyarakat internasional. Kita juga mengharapkan, kepemimpinan periode kedua Barack Obama akan lebih berpihak kepada kepentingan negara-negara berkembang dan meningkatkan kemitraan strategis dalam hubungan bilateral Indonesia—Amerika Serikat.

Selain itu, Dewan menyambut baik dan mengucapkan selamat kepada pemimpin baru China, Xi Jinping yang semula merupakan Wakil Presiden XI. Xi Jinping telah mengambil alih posisi sekjen partai dari Presiden Hu Jintao. Kita berharap di bawah kepemimpinan Xi Jinping ada peningkatan kerja sama di segala bidang, terutama di bidang ekonomi baik untuk kawasan regional maupun hubungannya dengan Indonesia. Pemimpin China yang baru perlu memahami lebih banyak tentang dunia dan perkembangannya yang sangat dinamis di era globalisasi.

Sidang Dewan yang terhormat,

Demikian beberapa hal yang perlu kami sampaikan pada Pidato Pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2012-2013. Sebelum menutup pidato ini, perlu diingatkan kembali bahwa saat ini wilayah Indonesia sudah memasuki musim hujan. Bahkan, telah

terjadi banjir bandang di sejumlah kawasan di Indonesia yang telah membawa korban jiwa. Mulai dari beberapa kecamatan di Sumatra Utara dan Bengkulu, beberapa wilayah di Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Barat. Di belahan dunia yang lain, Dewan turut prihatin dengan berbagai bencana alam seperti badai Sandy di Amerika Serikat dan gempa bumi di Guatemala. Akibat bencana alam sangat beragam, selain menelan korban jiwa, juga akses transportasi di sejumlah wilayah yang terputus sampai terendamnya prasarana umum.

Banjir bukanlah sesuatu yang harus diperdebatkan, tetapi harus diantisipasi dengan melakukan tindakan konkret. Di Jakarta, banjir dan pembangunan saling berinteraksi, artinya banjir dapat merusak hasil pembangunan. Namun sebaliknya, terkadang hasil pembangunan itu sendiri yang menyebabkan terjadinya banjir.

Oleh karena itu, kepada masyarakat di seluruh wilayah, termasuk Jakarta dan sekitarnya, harus siap untuk melakukan penanggulangan bencana apabila banjir benar-benar datang, melakukan koordinasi antar kepala daerah dan lembaga-lembaga terkait, agar dapat meminimalisir dampak yang ditimbulkan akibat banjir dan datangnya musim hujan.

Demikianlah Pidato Pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2012-2013 pada Rapat Paripurna Dewan hari ini. Pada kesempatan ini, izinkan Pimpinan DPR mengucapkan "Selamat Tahun Baru Islam 1434 Hijriyah." Mudah-mudahan tahun yang akan kita jalani ini, membawa berkah bagi kita semua. Amiin. Selamat menjalankan tugas dalam Masa Persidangan II.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jakarta, 19 November 2012

**KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

Dr. H. Marzuki Alie